

Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Binjai

Putranto Manalu¹, Fahmi Syahpreza Tarigan¹, Ermi Girsang^{2*}, Chrismis Novalinda Ginting²

¹ Bagian Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Ilmu Kesehatan Universitas Prima Indonesia

² Bagian Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Ilmu Kesehatan Universitas Prima Indonesia

*Corresponding author: ermigirsang@unprimdn.ac.id

Info Artikel: Diterima 13 April 2022 ; Direvisi 3 Agustus 2022 ; Disetujui 5 Agustus 2022
Tersedia online : 18 Oktober 2022 ; Diterbitkan secara teratur : Oktober 2022

Cara sitasi (Vancouver): Manalu P, Tarigan FS, Girsang E, Ginting CN. Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Binjai. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia [Online]. 2022 Oct;21(3):285-292. <https://doi.org/10.14710/jkli.21.3.285-292>.

ABSTRAK

Latar belakang: Pengelolaan sampah merupakan permasalahan penting yang harus diprioritaskan oleh pemerintah mengingat pertumbuhan penduduk yang cukup masif yang berimplikasi pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Binjai masih belum optimal yang diindikasikan peningkatan volume sampah tiap tahunnya. Studi ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Binjai.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek penelitian terdiri dari kepala UPTD Pengolahan Sampah dan TPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, kepala sub bagian umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, dan 2 orang fasilitator lapangan UPTD Pengolahan Sampah dan TPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sebagai informan triangulasi. Adapun variabel yang diteliti adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara mendalam, pengamatan langsung dan studi dokumen. Data dianalisis dengan model interaktif berupa analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif dan narasi yang menyertainya.

Hasil: Pada studi ini ditemukan hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Binjai antara lain tidak adanya peraturan daerah yang spesifik mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan berakibat pada ketersediaan anggaran. Dukungan pimpinan yang kurang untuk menjadikan program ini sebagai program prioritas menjadi kendala lainnya. Sumber daya manusia yang tersedia secara kuantitatif cukup namun secara kualitatif sangat kurang, serta masih banyak sumber daya yang kurang produktif dalam menjalankan tugasnya.

Simpulan: Implementasi pengolahan sampah rumah tangga menghadapi hambatan dari sisi regulasi pendukung, anggaran dan SDM yang kurang memadai, dan minimnya dukungan pimpinan. Dengan berbagai hambatan tersebut, penting bagi *stakeholder* untuk memprioritaskan penyusunan peraturan daerah pendukung kebijakan strategi nasional pengolahan sampah rumah tangga (Jakstranas) agar pelaksanaan kegiatan memiliki payung hukum yang jelas. Selain itu, penempatan SDM yang kompeten dan sesuai keahliannya dapat membantu mengatasi hambatan teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Kata kunci: pengelolaan sampah; implementasi kebijakan; Jakstrada

ABSTRACT**Title: Barriers to the Implementation of Household Waste Management Policies in Binjai City**

Background: Waste management is one of the paramount issue that must be prioritized by the government, given the relatively rapid population growth that impacts the increase of waste volume being generated. The waste management policy implementation at Binjai City is not yet optimal indicated by the increase of waste volume annually. This study serves to evaluate the household waste management policy implementation and household-like waste at Binjai City.

Method: This research is qualitative research with case study approach. Subjects consisted of the head of Waste Treatment and Final Processing Site of the Regional Environmental Office of Binjai City, the head of the general and staffing sub-section of the Regional Environmental Office of Binjai City, and 2 field facilitators of the Waste Treatment and Final Processing Site of the Regional Environmental Office of Binjai City as triangulation informants. The variables studied were communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The determination of research subjects was conducted through the purposive sampling technique. For data collection the researchers conducted in-depth interview, direct observation and literature study. The data were analyzed using an interactive model in the form of the qualitative analysis presented in the descriptive form and accompanying narration.

Result: For this research, several barriers were found for the household waste management policy implementation at Binjai City, such as the lack of specific regional regulations concerning household waste management and in which it was affected by the budget availability. The lack of leadership support to make this program as a priority program was also found to be another obstacle. The human resources available in a sufficient quantitative manner does not translate well in quality sense, and there were still many less productive human resources performing their duties.

Conclusion: The implementation of household waste management faces barriers in terms of supporting regulations, inadequate budgets and human resources, and lack of leadership support. Through such barriers, it is crucial for the stakeholders to prioritize the preparation of supporting regional regulations for national strategy for managing household waste policy (Jakstranas) in order for such implementation to have clear legal basis. Additionally, the placement of competent human resource and in accordance with their expertise could facilitate to overcome the technical obstacles in implementing such activities on the field.

Keywords: waste management; policy implementation; Jakstrada

PENDAHULUAN

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah menjadi meningkat dan beragam.¹ Kondisi tersebut berlangsung di berbagai negara dan menciptakan permasalahan publik sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu.² Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.³ Studi terdahulu mengungkapkan permasalahan utama di dalam pengelolaan sampah adalah rendahnya akses terhadap layanan pengelolaan sampah.^{2,4} Selain itu, diperlukan tahapan yang cukup panjang dalam memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah.^{5,6}

Keberhasilan metode pemilahan sampah sangat bergantung pada partisipasi aktif para penghasil sampah di berbagai komunitas dan bagaimana mereka mematuhi prinsip-prinsip pemilahan dan pemisahan sampah.⁷ Selain perubahan perilaku masyarakat, paket regulasi merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah rumah tangga.⁸ Berbagai negara di Asia telah mengembangkan beberapa kebijakan dan program pengelolaan sampah. Di Cina yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, pemerintah China membuat

kebijakan pengelolaan sampah yang mewajibkan adanya pemilahan sampah dengan target tingkat daur ulang sampah domestik adalah sekitar 35% pada akhir tahun 2020.⁹ Malaysia menyusun regulasi (ACT 672) yang mewajibkan pemilahan dan daur limbah padat perkotaan.¹⁰ Thailand juga telah mengeluarkan kebijakan/peraturan untuk mendukung sistem pengelolaan limbah, namun belum maksimal akibat dari rendahnya partisipasi publik, implementasi kebijakan, dan dukungan kelembagaan.¹¹

Di Indonesia, pemerintah menetapkan peraturan pengelolaan sampah rumah tangga dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas). Regulasi ini diharapkan menjadi terobosan terbaru dalam pengelolaan sampah nasional dan melibatkan seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari rumah tangga yang menjadi sumber sampah ke tempat pemrosesan akhir.¹² Pemerintah Daerah juga diamanatkan untuk mengaplikasikan regulasi tersebut di daerah masing-masing, meskipun dalam pelaksanaannya ditemui beragam hambatan. Implementasi Jakstrada di Tanjung Pinang mengalami permasalahan seperti keterbatasan SDM dan informasi program yang belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat.¹³ Di

Bangkalan, sebagian besar program baru dijalankan di tahun 2020 dan dari segi substansi masih belum adanya ketentuan terkait penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggar.¹⁴ Minimnya anggaran dan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahliannya menjadi hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.¹⁵ Di Kuantan Singingi, belum optimalnya sumberdaya dan fasilitas pengangkut sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup serta terbatasnya standar operasional prosedur terkait pengelolaan persampahan menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan.¹⁶

Data yang dirilis oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa produksi sampah di Sumatera Utara mencapai 10.219 ton per hari atau 3.740.362 ton per tahun namun yang dikelola baru 11%. Sekitar 89% sampah tidak dapat dikelola dengan baik dan menimbulkan permasalahan baru bagi lingkungan.¹⁷ Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengeluarkan kebijakan turunan Jakstranas berupa Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.3 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.¹⁸ Namun sejauh ini belum ada studi ilmiah yang mengevaluasi implementasi kebijakan Jakstrada di Sumatera Utara. Pemilihan lokasi studi di Kota Binjai dikarenakan peningkatan volume sampah yang cukup signifikan per tahunnya. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai menunjukkan volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebanyak 30.367 ton pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 32.464 ton pada tahun 2020.¹⁹ Oleh karena itu perlu dilakukan studi evaluasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Evaluasi atas sebuah implementasi kebijakan penting dilakukan untuk memperoleh informasi pengambilan keputusan program yang sedang berlangsung dan mengeksplorasi bagaimana dan mengapa hasil tidak tercapai.²⁰ Kegiatan evaluatif penting untuk pemerintahan yang baik dan dapat berkontribusi pada kemajuan kebijakan publik yang lebih efektif, manjur, dan efektif.²¹ Pada studi ini, analisis didasarkan pada model yang dikembangkan oleh George Edward III. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III menitikberatkan analisis pada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.²² Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Binjai. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi stakeholder dalam pengambilan kebijakan penanganan serta pengelolaan sampah secara optimal.

MATERI DAN METODE

Studi ini merupakan studi kualitatif dengan desain studi kasus. Peneliti melakukan evaluasi terhadap suatu program kebijakan yaitu Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Persampahan dalam waktu tertentu. Penelitian dilakukan di UPTD Pengolahan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai pada bulan Oktober 2021. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek penelitian terdiri dari kepala UPTD Pengolahan Sampah dan TPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sebagai informan utama (IF01), kepala sub bagian umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai (IF02) sebagai informan utama, dan 2 orang fasilitator lapangan UPTD Pengolahan Sampah dan TPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sebagai informan triangulasi (IT01 dan IT02). Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara mendalam, pengamatan langsung dan studi dokumen. Pedoman wawancara mendalam berisi poin-poin penting yang berfokus pada regulasi, anggaran, SDM, dukungan pimpinan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan Jakstrada. Pengamatan langsung dilakukan pada proses pengolahan sampah rumah tangga mulai dari penjemputan sampah organik hingga pada pengolahan di TPA. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber data yang terdapat di UPTD Pengolahan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif berupa analisis kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif dan narasi yang menyertainya. Analisis data dimulai dengan proses reduksi data, verifikasi dan penarikan simpulan. Peneliti melakukan validasi (pemeriksaan keabsahan data) pada temuan penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi data (membandingkan sumber data).²³ Pada studi ini, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dan hasil wawancara dengan informan triangulasi yaitu 2 orang fasilitator lapangan UPTD Pengolahan Sampah dan TPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Jakstrada merupakan salah satu rancangan kebijakan yang dibuat berdasarkan amanat Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas) yang ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017. Setiap daerah wajib memiliki Kebijakan Strategi Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam bentuk peraturan daerah. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Secara demografi berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Binjai di tahun 2017 berjumlah 270.926 jiwa dan mengalami kenaikan pertumbuhan sekitar 1,12% setiap tahunnya. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka akan berimplikasi terhadap potensi timbunan sampah. Kota Binjai merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang masih menyusun Kebijakan Strategi Daerah yang akan dibuat dalam bentuk produk hukum berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota. Meski belum memiliki peraturan daerah tentang Kebijakan Jakstrada di Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sudah menjalankan program untuk mencapai target Kebijakan Jakstrada yaitu pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%. Kota Binjai mengadopsi kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sejak bulan November 2018.

Tabel 1 Jumlah data penduduk dan potensi timbunan sampah Kota Binjai

| Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa/Tahun) | Timbunan Sampah (Ton/Tahun) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|
| 2018 | 273.892 | 69.979 |
| 2019 | 276.597 | 70.670 |
| 2020 | 279.302 | 71.361 |
| 2021 | 282.004 | 72.052 |
| 2022 | 284.703 | 72.741 |
| 2023 | 287.401 | 73.430 |
| 2024 | 290.098 | 74.120 |
| 2025 | 292.794 | 74.808 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, 2018

Regulasi

Dalam menjalankan program pengelolaan sampah yang ada di Kota Binjai maka dibutuhkan kebijakan dan regulasi yang menaungi dan menjadi acuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Peneliti menanyakan kepada informan mengenai rancangan kebijakan yang menaungi program Jakstrada serta turunan regulasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Binjai. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa belum ada peraturan daerah yang spesifik, Jakstrada ini hanya sebagai peraturan daerah pendukung.

“... tidak ada Perda dasarnya, Jakstrada ini kan cuma perda pendukung, kita gak ada perda pengolahan persampahan seperti sangsi atau SOP.” (IF 02)

Peneliti melakukan wawancara kepada informan triangulasi dan didapatkan keterangan bahwa tidak adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah membuat kebijakan tersebut sulit untuk dilaksanakan. Mekanisme sanksi juga tidak dapat diterapkan akibat tidak adanya payung hukum. Meskipun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota

Binjai sudah menjalankan program pengolahan sampah seperti bank sampah dan rumah kompos.

“... programnya sudah kita laksanakan dari 2018, contohnya kami buat program bank sampah di Kota Binjai sekitar 20. Selain itu kita juga ada pengolahan sampah organik, di TPA diubah sampah organik jadi pupuk kompos dari masyarakat.” (IF 01)

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah di Kota Binjai saat ini sudah dalam tahap proses eksaminasi (tahap pengujian dan pemeriksaan). Belum adanya peraturan daerah yang spesifik mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga berdampak pada penentuan indikator dan sasaran, serta rencana kebutuhan anggaran. Literatur menyebutkan bahwa dengan adanya peraturan dapat membantu memastikan SDM yang terkait dengan program bertindak sesuai dengan kebijakan, prosedur dan aturan yang berlaku.²⁴ Oleh karena perlu dilakukan upaya advokasi kepada stakeholder terkait agar penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah rumah menjadi prioritas. Advokasi merupakan proses melakukan intervensi yang bertujuan memengaruhi proses penyusunan atau penerapan kebijakan.²⁵

Namun sudah ada program yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai seperti bank sampah, rumah kompos, pemulung sama biopori. Ada beberapa kegiatan tidak bisa dijalankan karena terhambat oleh pandemi. Berikut kutipan wawancara dengan informan triangulasi.

“... udah ada program yang dijalankan kayak bank sampah, rumah kompos, aaaa pemulung sama biopori, programnya berjalan tapi gak semua karena banyak hambatan kayak pandemi ini.” (IFT 01)

Anggaran

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai stakeholder adalah anggaran program yang belum masuk menjadi prioritas. Penyusunan rancangan kebijakan telah dilakukan sejak tiga tahun lalu atau tepatnya sejak 2018 sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas yang dilanjutkan dengan Jakstrada. Namun ditemukan permasalahan yaitu belum disetujuinya anggaran untuk pembuatan Perda Jakstrada dalam belanja APBD daerah Kota Binjai pada tahun 2019. Anggaran untuk pembuatan rancangan Jakstrada tidak masuk dalam belanja APBD daerah.

“...hambatan kita saat ini ya itu, anggaran ngga turun dari APBD.” (IF01)

“... anggaran untuk pembuatan rancangan Jakstrada tidak masuk dalam belanja APBD daerah.” (IF02)

Peneliti menanyakan kepada informan triangulasi tentang hambatan lain dalam pembuatan kebijakan Jakstrada dan didapatkan keterangan bahwa hambatan yang sangat besar saat ini adalah anggaran karena sejak terjadi pandemi anggaran mengalami penurunan.

“... ya sementara 2 tahun ini kan covid jadi anggaran kami terkendala, kami udah ngajukan 2018 tapi belum di acc malah sekarang di kurangi”. (IFT 01)

“... untuk menjalankan program ada tapi tahun ini sudah tidak ada tapi kalau untuk pembuatan Perwal tidak ada”. (IFT 02)

Peneliti melakukan pemeriksaan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Tahun Anggaran (TA) 2019 untuk memastikan bahwa anggaran program memang belum diajukan. Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa pada RKA TA 2019 memang belum dianggarkan. Pada tahun 2020, anggaran tidak disetujui dikarenakan adanya realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Kondisi tersebut terjadi hingga saat ini, bersamaan dengan belum berakhirnya pandemi.

Literatur menyebutkan bahwa ketersediaan anggaran menjadi faktor penting dalam kesuksesan sebuah program, apalagi program tersebut merupakan program prioritas.²⁶ Rencana dan penggunaan anggaran untuk sebuah kebijakan idealnya digunakan pembuat kebijakan untuk alat analisis proyeksi keberhasilan kebijakan yang diterapkan berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia.²⁷

Dalam menjalankan program yang ada Dinas Lingkungan Hidup menggunakan anggaran rutin pengolahan sampah UPTD Pengolahan Sampah dan TPA. Namun saat ini anggaran rutin tersebut mengalami pengurangan dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai melalui UPTD Pengolahan Sampah & TPA tetap menjalankan program-program untuk mencapai target Jakstrada persampahan pada tahun 2025 mendatang melalui program bank sampah, pemilahan sampah kompos rumah tangga, pembuatan lubang biopori dan pengutipan kembali sampah yang sudah masuk ke TPA oleh pemulung.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu permasalahan dalam menjalankan kebijakan Jakstrada di Kota Binjai. Selain masalah anggaran dalam penyusunan Perda Jakstrada dibutuhkan data untuk mengisi neraca pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga yang terdiri dari data bank sampah,

pembuatan lubang biopori, pengolahan sampah organik dan pengutipan kembali sampah di TPA. Dalam pengisian data tersebut didapati hambatan yaitu kurangnya SDM, dan SDM yang ada saat ini kurang aktif dalam melakukan tugasnya. SDM merupakan fasilitator yang bertugas sebagai penyuluh dan pengumpul data pengolahan sampah di masyarakat. Dari hasil wawancara kepada informan utaman dan informan triangulasi didapatkan keterangan bahwa banyak petugas yang tidak produktif.

“... kalau SDM nya saya ampun lah, malas-malas sekali, sudah di tegur juga ya gak ada efeknya.” (IF 01)

“... kalau untuk SDM belum sesuai ya, dari 25 orang yang aktif sekitar 7 orang”. (IFT 02)

Pengumpulan data Jakstrada yang berisi tentang kondisi dan metode pengelolaan sampah dilakukan dengan mengunjungi bank sampah. Namun informan mengakui mengalami kesulitan akibat dari kurangnya tenaga yang mau ikut serta dalam pengambilan data. Informan triangulasi juga menyebutkan bahwa kegiatan pengambilan data kurang efektif karena tidak dilakukan secara rutin.

“... gimana ya, mau ambil data juga kita susah karena petugasnya banyak tapi ya gitulah, masuknya jarang, kalau nggak ada kerjaan ya nggak masuk.” (IF02)

“... kalau dibilang ya kurang efektif karena kalau gak ada jadwal kunjungan atau kerjaan ya tidak datang. (IFT 01)

Dukungan Pimpinan

Dukungan pimpinan merupakan salah satu hal penting dalam pembuatan kebijakan Jakstrada di Kota Binjai. Dari hasil wawancara, informan mengatakan bahwa dukungan dari pimpinan masih sangat kurang.

“... kalau untuk dukungan dari 2018 sampai sekarang ya masih kurang ya, saya masih berjuang sendiri.” (IF 01)

Menurut informan, pimpinan sampai saat ini hanya berfokus pada program atau kegiatan langsung yang dapat terlihat oleh publik seperti pembangunan dan rehabilitasi taman kota. Informan juga menyatakan pimpinan kurang mendorong terbentuknya regulasi yang mewadahi pengelolaan sampah sebagai tindak lanjut peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

“... sampai sekarang belum ada pimpinan yang betul-betul mendukung soal Jakstrada ini, fokusnya cuma yang terlihat kayak jalan bersih, taman bersih. (IF 02)

Peneliti melakukan wawancara pada informan triangulasi dan didapatkan keterangan bahwa selain dukungan secara moril yang masih kurang, fasilitas juga belum memadai dalam menjalankan program Jakstrada. Hal ini menjadi salah satu penyebab Jakstrada di Kota Binjai tidak berjalan. Berikut kutipan wawancara dengan informan triangulasi.

“... dukungan ya ada, cuma gak sepenuhnya lebih ke kurang mendukung, untuk fasilitasnya juga sekedar sudah ada aja”. (IFT 01)

“... kalau dukungan mungkin cuma sekedar ajalah apalagi fasilitasnya juga gak ada terus dimana pun kalau anggaran dana gak ada ya susah ya”.(IFT02)

Dalam penelitiannya, Armhela mengatakan bahwa peran pemimpin sangat penting dalam suatu organisasi. Pemimpin sebagai pemegang kekuasaan dalam organisasi mempunyai pengaruh yang besar dalam menunjang kinerja pegawainya pada suatu organisasi. Arahan dari pimpinan merupakan petunjuk, intruksi, atau perintah yang harus dikerjakan oleh pegawai agar pegawai dapat memahami pekerjaan yang harus mereka kerjakan.²⁸

Pelaksanaan dan target yang akan dicapai

Dalam menjalankan Kebijakan Jakstrada terdapat target 30% pengurangan dan 70% penanganan. Namun informan merasa tidak dapat mencapai target dikarenakan masih banyak kekurangan.

“... kalau belum ada kesadaran dari masyarakat terus kerjasama yang baik diantara SDM yang ada ya kecil harapan untuk target tersebut.” (IF 02)

Program yang sudah ada dipercaya dapat membantu mencapai target Jakstrada meskipun dengan jumlah yang sangat kecil namun belum maksimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

“... saya yakin ya target yang sudah saya buat ini ya bisa lah membantu mencapai target Jakstrada. Meskipun ya belum maksimal, semua itu kan kembali ke masyarakat.” (IF 01)

Mengingat banyaknya hambatan dalam menjalankan program untuk pencapaian target, informan merasa perlu dukungan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk mencapai target tersebut, dan tidak dapat dibebankan hanya pada satu pihak. Peneliti mewawancarai informan triangulasi dan didapatkan keterangan bahwa program yang baik jika tidak didukung oleh fasilitas yang memadai juga dianggap sia-sia oleh informan triangulasi.

“... pelaksanaannya itu banyak hambatannya ya karena warga itu kurang mau dalam memilah jadi hambatan besar kalau diliat dari saat ini sih gak tercapai.” (IFT 01)

“... programnya sih sudah baik tapi fasilitasnya juga belum memadai jadi ya saya masih ragu untuk pencapaian targetnya terpenuhi.” (IFT 02)

Evaluasi

Program Jakstrada sudah berjalan selama tiga tahun namun belum ada evaluasi untuk program yang sudah berjalan. Sampai saat ini hanya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Di samping itu kurangnya minat dan respon warga tentang pengolahan sampah karena dianggap terlalu merepotkan menyebabkan tidak dilakukannya evaluasi terhadap program yang dijalankan.

“... terus sosialisasi ke masyarakat ya karena kesadaran masyarakat itu yang paling penting, kita sekarang cuma bisa sosialisasi aja.” (IF 01)

“... warga kurang berminat soal sampah apalagi bank sampah, jadi kita cuma bisa sosialisasi lagi ke masyarakat.” (IFT 01)

Informan menyatakan tidak bisa bertindak tegas dan memberikan sanksi dikarenakan tidak adanya landasan hukum yang mendukung tentang pengolahan sampah di Kota Binjai.

“... kita nggak punya perda dasar jadi susah kalau mau terlalu tegas nggak ada perda yang bisa dikasi sanksi, evaluasinya ya paling sosialisasi.” (IF 02)

Ketersediaan anggaran yang terbatas membuat Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai hanya dapat menjalankan program *bank* sampah dan pengomposan. *Bank* sampah tersebut bersifat swadaya masyarakat yang dijalankan oleh masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai fasilitator dan pengawasan dalam menjalankan *bank* sampah oleh masyarakat. Program yang sudah berjalan saat ini cukup membantu dalamantisipasi dan pengurangan timbulan sampah yang masuk ke TPA hingga 30 – 40%. Dari hasil observasi di lapangan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai memiliki *bank* sampah bernama *bank* sampah DLH. *Bank* sampah ini ditujukan tidak hanya untuk pegawai internal tetapi juga dibuka untuk umum. *Bank* sampah ini buka setiap hari Jumat mulai pukul 09.00 sampai pukul 12.00 WIB. Sampah dijual jika sudah terkumpul banyak dan untuk sampah yang tidak dapat dijual diolah menjadi *ecobrick* dan kerajinan tangan seperti baju daur ulang yang digunakan untuk pameran. Penelitian Suryani (2014) menyimpulkan program pengolahan sampah melalui *bank* sampah dirasa efektif dikarenakan terdapat nilai ekonomis di

dalamnya. Nasabah yang mayoritas ibu rumah tangga dapat menyetorkan sampah anorganiknya dan ditukarkan dengan uang setelah memiliki tabungan yang cukup besar. Dengan kata lain sampah yang masuk ke TPA berkurang dan sampah yang disetor ke bank sampah dapat didaur ulang kembali.²⁹ Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah membawa dampak positif pada masyarakat. Masyarakat berpikir bahwa lebih baik menabung sampah daripada harus membakar atau membuangnya. Keuntungan ini menjadi bahan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah dan pemilahan sampah rumah tangga agar bernilai ekonomis.³⁰

SIMPULAN

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh sinergitas antar komponen organisasi mulai dari regulasi, SDM, dukungan pimpinan hingga anggaran yang memadai. Pada studi ini ditemukan hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Binjai adalah tidak adanya peraturan daerah yang spesifik mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan berakibat pada ketersediaan anggaran. Dukungan pimpinan yang kurang untuk menjadikan program ini sebagai program prioritas menjadi kendala lain. Sumber daya manusia yang tersedia secara kuantitatif cukup namun secara kualitatif sangat kurang, serta masih banyak sumber daya yang kurang produktif dalam menjalankan tugasnya. Dengan berbagai hambatan tersebut, penting bagi *stakeholder* untuk memprioritas penyusunan peraturan daerah pendukung kebijakan Jakstranas agar pelaksanaan kegiatan memiliki payung hukum yang jelas. Selain itu, penempatan SDM sesuai keahlian dan kompetensi dapat membantu mengatasi hambatan teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Liu J, Li Q, Gu W, Wang C. The Impact of Consumption Patterns on the Generation of Municipal Solid Waste in China: Evidences from Provincial Data. *Int J Environ Res Public Health*. 2019;16(10):1–19. <https://doi.org/10.3390/ijerph16101717>
- Abdel-Shafy HI, Mansour MSM. Solid waste issue: Sources, composition, disposal, recycling, and valorization. *Egypt J Pet*. 2018;27(4):1275–90. <https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2018.07.003>
- Ferronato N, Torretta V. Waste Mismanagement in Developing Countries: A Review of Global Issues. *Int J Environ Res Public Health*. 2019 Mar 24;16(6):1060. <https://doi.org/10.3390/ijerph16061060>
- Yukalang N, Clarke B, Ross K. Barriers to Effective Municipal Solid Waste Management in a Rapidly Urbanizing Area in Thailand. *Int J Environ Res Public Health*. 2017;14(9):1–23. <https://doi.org/10.3390/ijerph14091013>
- Ahmad M, Tri U, Tri W, Novia R. Community Empowerment in Waste Management Area for Sustainable Development. In: *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Shanghai: IOP Publishing; 2019. p. 12019. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/281/1/012019>
- Hadiyanti P. A Group Approach in a Community Empowerment: A Case Study of Waste Recycling Group in Jakarta. *J Educ Pract*. 2016;7(29):157–67.
- Miezah K, Obiri-Danso K, Kádár Z, Fei-Baffoe B, Mensah MY. Municipal solid waste characterization and quantification as a measure towards effective waste management in Ghana. *Waste Manag*. 2015;46(12):15–27. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.09.009>
- Sukholthaman P, Sharp A. A system dynamics model to evaluate effects of source separation of municipal solid waste management: A case of Bangkok, Thailand. *Waste Manag*. 2016;52(6):50–61. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.03.026>
- Xiao S, Dong H, Geng Y, Brander M. An overview of China's recyclable waste recycling and recommendations for integrated solutions. *Resour Conserv Recycl*. 2018;134(A1-A8 (July)):112–20. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.02.032>
- Moh YC, Manaf LA. Solid waste management transformation and future challenges of source separation and recycling practice in Malaysia. *Resour Conserv Recycl*. 2017;116(1):1–14. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.09.012>
- Babel S, Ta A, Habarakada Liyanage T. Current Situation and Challenges of Waste Management in Thailand. In: *Sustainable Waste Management Challenges in Developing Countries*. 2020. p. 409–40. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-0198-6.ch017>
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakarta; 2017.
- Fadilla N, Safitri DP, Kurnianingsih F. Implementasi Kebijakan Dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Universitas Maritim Raja Ali Haji; 2019.
- Hardiyanti R, Nuswardani N. Kebijakan dan Strategi Daerah Bagi Pengelolaan Sampah Anorganik di Wilayah Kabupaten Bangkalan. Universitas Trunojoyo Madura; 2022.
- Bussalim M. Implementasi Kebijakan Pemerintah Aceh Besar Terhadap Pengelolaan Sampah. *J Ilm Mhs Fak Ilmu Sos dan Ilmu Polit Unsyiah*. 2017;2(4):1–20.
- Ariesti E, Isril. Implementasi Kebijakan

- Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2019. *J Online Mhs Ilmu Sos dan Ilmu Polit.* 2021;9(1):1–15.
17. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Data Pengelolaan Sampah Sumatera Utara [Internet]. Medan; 2020. Available from: biroadpim.sumutprov.go.id
 18. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.3 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Medan: Pemerintah Propinsi Sumatera Utara; 2020.
 19. Pemerintah Kota Binjai. Data Pengelolaan Sampah Kota Binjai Tahun 2020. Kota Binjai; 2021.
 20. Mugwagwa J, Edwards D, de Haan S. Assessing the implementation and influence of policies that support research and innovation systems for health: The cases of Mozambique, Senegal, and Tanzania. *Heal Res Policy Syst.* 2015;13(1):1–7. <https://doi.org/10.1186/s12961-015-0010-2>
 21. Oliveira LR de, Passador CS. Theoretical essay on public policy evaluations. *Cad EBAPEBR.* 2019;17(2):324–7. <https://doi.org/10.1590/1679-395169657>
 22. George EI. Implementing public policy. Wangshington, DC Robert L Peabody. 1980;
 23. Moleong LJ. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya; 2010.
 24. Clarke D. Law, regulation and strategizing for health. In: Strategizing national health in the 21st century: a handbook. World Health Organization; 2016.
 25. Cullerton K, Donnet T, Lee A, Gallegos D. Effective advocacy strategies for influencing government nutrition policy: A conceptual model. *Int J Behav Nutr Phys Act.* 2018;15(1):1–11. <https://doi.org/10.1186/s12966-018-0716-y>
 26. Hudson B, Hunter D, Peckham S. Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Des Pract.* 2019 Jan 2;2(1):1–14. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
 27. Glenngård AH, Maina TM. Reversing the trend of weak policy implementation in the Kenyan health sector? – a study of budget allocation and spending of health resources versus set priorities. *Heal Res Policy Syst.* 2007;5(3):1–9. <https://doi.org/10.1186/1478-4505-5-3>
 28. Fazrien A, Sumartono, Domai T. Peran Pemimpin Dalam Pencapaian Kinerja Pegawai (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). *J Adm Publik Mhs Univ Brawijaya.* 2014;2(4):603–7.
 29. Suryani AS. Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *J Aspir.* 2014;5(1):71–84.
 30. Saputro YE, Kismartini, Syafrudin. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah. *Indones J Conserv.* 2015;4(1):83–94.



©2022. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.